

Ratu Adil dan Ratu Atut

Bagian pertama
dari dua tulisan

Oleh : Hendra Kurniawan

RATU diartikan sebagai raja atau pemimpin. Meskipun sama-sama ratu, namun kedua ratu yang dimaksud dalam judul tulisan ini berbeda. Istilah Ratu Adil merujuk pada sebuah konsep pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, sedangkan Ratu Atut yang dimaksud tentu saja Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang kini menjadi tahanan KPK karena kasus korupsi. Meskipun keduanya bersangkutan dengan hal kepemimpinan, namun kedua-duanya bertolak belakang. Ratu Atut bukanlah Ratu Adil dan Ratu Adil bukanlah Ratu Atut.

Ratu Adil adalah sosok pemimpin ideal yang muncul sebagai gagasan atau ide dalam pemikiran kolektif masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa. Ratu Adil muncul dalam ramalan tradisi Jawa yang

bersifat mesia-nistik yang disebut dengan istilah Eru Cakra (Ricklefs, 1991). Masyarakat menanti-nantikan akan datangnya juru selamat yaitu raja yang adil. Dalam konteks ini, sosok Ratu Adil digambarkan sebagai seseorang yang berkharisma, berjiwa pemimpin, adil, tegas, bersih, jujur, dan berbudi luhur. Ratu Adil dipercaya mampu membawa masyarakat keluar dari kesengsaraan dan menuju pada kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Hadji Oemar Said Tjokroaminto, pemimpin Sarikat Islam (SI), sebuah organisasi pergerakan nasional Indonesia pada awal Abad XX, dianggap sebagai Ratu Adil yang membawa bangsa ini berani bangkit melawan kesewenang-wenangan kolonialisme Belanda. Presiden pertama kita, Soekarno, juga sosok Ratu Adil yang berhasil mem-

bebaskan bangsa ini dari penjajahan untuk menuju pada kehidupan bernegara yang merdeka. Demikian pula dengan Presiden Soeharto oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai Ratu Adil yang membawa negara ini pada taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan ekonomi. Sosok-sosok pemimpin seperti mereka inilah diharapkan kembali muncul dan menjadi penyelamat bagi bangsa dan negara yang kian terpuruk.

Atut Chosiyah menyandang nama Ratu karena konon masih keturunan dari Raja Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Klaim darah biru yang dimiliki Atut saat ini sedang dipertanyakan karena ada yang mengungkapkan bahwa dalam silsilah Sultan Maulana Hasanuddin hingga keturunan ke 12 tidak

tercantum daftar keluarga Atut. Lepas dari polemik mengenai gelar kebangsawanan tersebut, sesungguhnya sudah tepat apabila gelar "Ratu" yang sebenarnya disematkan dalam nama Atut yang beberapa tahun terakhir ini membangun dinasti politiknya di Banten.

Selama menjadi Gubernur Banten, Ratu Atut memang benar-benar telah menempatkan diri layaknya ratu (baca: raja) yang berkuasa di Banten. Keluarganya menjadi penguasa seantero Banten. Ayah Atut, Tubagus Chasan Sochib, seorang jawara Banten sekaligus pengusaha yang sukses yang disegani. Semenjak Atut menjadi Gubernur Banten maka bisnis keluarganya semakin pesat. Tak hanya itu, keluarga Atut juga menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Rabu Wage, 15 Januari 2014

HALAMAN 4

Ratu Adil dan Ratu Atut

Bagian terakhir
dari dua tulisan

Oleh : Hendra Kurniawan

SELAIN Atut yang sudah dua periode menjabat sebagai gubernur, suaminya, Himat Tomet menjabat anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014. Anak Atut, Andika Hazrumy menjabat anggota DPD Banten periode 2009-2014 sekaligus sebagai pengusaha. Menantunya, Ade Rossi Khoerunisa, menjabat wakil ketua DPRD Kota Serang periode 2009-2014. Adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, menjabat wakil bupati Serang periode 2010-2015. Adik iparnya, Airin Rachmi Diany menjabat wali kota Tangerang Selatan periode 2011-2016. Adik tirinya, Tubagus Haerul Jaman, anak dari istri kedua Chasan, menjabat wali kota Serang periode 2013-2018.

Adiknya, Ratu Lilis Karyawati menjabat Ketua DPD II Golkar Kota Serang periode 2009-2014. Suami dari Ratu Lilis, Aden Abdul Khaliq, menjabat anggota DPRD Banten periode 2009-2014. Anak dari istri ketiga Chasan, Ratu Heni Chendrayani dan Ratu Wawat Cherawati menjabat pengurus Kadin periode 2012-2017. Istri kelima Chasan atau ibu tiri Atut, Heryani Yuhana,

menjabat sebagai anggota DPRD Pandeglang periode 2009-2014. Demikian pula dengan istri keenam Chasan, Ratna Komalasari, juga menjabat anggota DPRD Kota Serang periode 2009-2014. Pendek kata keluarga Atut menjadi penguasa politik dan ekonomi di Banten.

Terbongkarnya dinasti politik Atut dan dugaan korupsi di dalamnya berawal dari tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar, terkait kasus sengketa pilkada Lebak, Banten. Sungguh miris melihat kerakusan Atut menggasak uang negara melalui dinasti politiknya. Kemegahan hidup yang dinikmati oleh Atut dan keluarganya berbanding terbalik dengan keadaan rakyat yang dipimpinnya. Lebih ironis lagi dalam kepemimpinannya angka kemiskinan penduduk Banten semakin meningkat. Data resmi statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2013 mencapai 626.243 orang (5,74 persen), naik dibandingkan dengan September 2012 sebesar 648.254 orang (5,71 persen).

Banten memang tergolong se-

bagai provinsi yang tertinggal. Sepuluh tahun Banten berdiri sebagai provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat, ternyata kondisi rakyatnya tidak jauh berbeda. Selain angka kemiskinan yang semakin tinggi, infrastruktur di provinsi yang notabene dekat dengan pemerintah pusat ini juga terabaikan. Satu hal yang terasa miris, kursi Gubernur Banten memang panas, dua orang yang pernah mendudukinya, yaitu Djoko Munandar dan kini Atut sama-sama tersandung kasus korupsi.

Tujuan mulia dari pembentukan provinsi baru maupun pemekaran daerah tidak bukan ialah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat di dalamnya. Akan tetapi tampaknya harapan ini sia-sia bagi rakyat Banten. Dua orang yang pernah menjabat sebagai gubernur Banten, yang sudah dipercaya dan memperoleh mandat rakyat ternyata tidak dapat cita-cita mulia itu.

Malahan yang terjadi sebaliknya yaitu rakyat dibodohi dan dikesewakan karena perbuatan mereka. Barangkali konsep Ratu Adil yang

bersumber dari Jangka (ramalan) Jayabaya ini tidak dapat dipertautkan begitu saja dengan tingkah polah sang ôRatuô Banten. Akan tetapi keserakahan yang dipertontonkan Atut jelas menyakiti hati rakyat. Di saat rakyat sedang menanti-nantikan kedatangan Imam Mahdi, juru selamat bangsa, justru selalu saja dihadapkan dengan perilaku busuk para pemimpinnya.

Rakyat kini berharap agar kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Atut ini tidak berjalan setengah-setengah. Tentu saja harapan ini tidak hanya berlaku bagi Atut, namun bagi siapa saja pelaku korupsi di Indonesia. Sebagai negara hukum maka setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib tunduk pada hukum. Hukum harus ditegakkan setegaktegaknya demi keadilan rakyat. Sudah semestinya yang salah mendapatkan ganjaran yang setimpal agar menimbulkan efek jera. Mudah-mudahan di tahun politik ini, penantian panjang akan datangnya sosok Satria Piningit, sang penerima wahyu itu, segera terwujud. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.